



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

*Topik: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan
Peraturan Daerah melalui Portal e-Legislasi*

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018
Waktu : 14.00-16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat 204

2. Pimpinan Rapat : Kepala Subdit Kualitas Pelayanan Publik,
Kementerian PPN/Bappenas

3. Peserta Rapat :

1. Direktorat Fasilitas Kepala Daerah, Kementerian Dalam Negeri
2. Direktorat Produk Hukum, Kementerian Dalam Negeri
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri
4. Komisi Informasi Pusat
5. Direktorat Hukum dan Regulasi, Bappenas
6. Sekretariat SDGs
7. Indonesia Parliamentary Center
8. National Democratic Institute
9. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L .

3. Tujuan dari renaksi ini adalah menyediakan platform terbuka dimana masyarakat dapat mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD.
4. Sebelumnya juga terdapat renaksi daerah yang memuat komitmen ketebukaan proses pembahasan rancangan perda di Kota Makassar dan Kota Semarang. Melalui portal e-legislasi akan mendekatkan DPRD dengan masyarakat.
5. Portal ini menyediakan fitur pembahasan sampai pengesahan rancangan perda. Dalam portal juga terdapat fungsi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mengusulkan perda secara online dengan ketentuan dan prasyarat yang bisa dikembangkan.
6. Terkait dengan produk hukum daerah menjadi kewenangan bagian hukum pemda. Dalam PP 18/2016 seharusnya terdapat fasilitas e-konsultasi, e-fasilitasi, e-register. E-fasilitasi dalam permendagri 80 ada satu pasal yang mengatur pembinaan perda. sebelum perda ditetapkan ada fasilitasi baik dari sisi substansi dan legal drafting.
7. Kemendagri sendiri telah mengembangkan platform E-perda sebagai bagian dari transparansi dan peningkatan partisipasi publik. Selain itu, Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah melakukan konsultasi publik terlebih dahulu sebelum perda disahkan.
8. Antara DPRD dan Kemendagri adalah insitusi yang terpisah, walaupun dalam kegiatan penyusunan perda, sekretariat dewan menjadi bagian dari biro hukum pemda.
9. Rencana aksi ini mendorong insiatif E-Legislasi yang ada di daerah untuk diangkat pada level nasional. Praktik tersebut dapat didorong dengan penggunaan surat edaran untuk mereplikasi praktir e-legislasi yang ada di Makassar dan Semarang.
10. Kemendagri masih akan berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitasi Daerah untuk mendiskusikan aksi ini. Selain itu, Biro Perencanaan juga akan merangkum seluruh komitmen OGI untuk sinkronisasikan pada program dan kegiatan.
11. Pada tahapan selanjutnya, perlu untuk dilakukan diskusi lanjutan untuk membahas usulan lebih lanjut.

Notula Rapat

Tities Eka A.

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi:

Aksi : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E- Legislasi.

Latar Belakang :

Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan perda. Selain itu membuka informasi dan data terkait dengan rancangan perda, agar masyarakat juga lebih dekat dengan DPRD.

| Aksi | Sasaran Akhir | Indikator Capaian | Penanggung Jawab | K/L/D/I Terkait |
|--|---|---|--------------------------|--|
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E- Legislasi. | Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat | 1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui platform E-Legislasi 2. Tersedianya platform e-legislasi dalam website DPRD di XX kabupaten/ kota | Kementerian Dalam Negeri | Komisi Informasi Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika |

